



EDISI JUMAT 17 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

Mengukur Arah Kiblat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa fenomena alam langka di mana posisi Matahari tepat berada di atas Ka'bah kembali terjadi. BMKG menjelaskan bahwa fenomena geografis ini hanya berlangsung dua kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 27-29 Mei pukul 16.18 WIB, serta 15-17 Juli pada pukul 16.27 WIB. Momen ini menjadi waktu terbaik dan paling akurat bagi umat Islam untuk mengecek, mengukur, atau mengkalibrasi ulang arah kiblat secara mandiri di rumah atau tempat ibadah masing-masing. Merespons fenomena ini, gerakan pengecekan ulang atau kalibrasi massal langsung dilakukan oleh berbagai pihak di daerah, mulai dari Kementerian Agama Tulungagung, DKM Masjid Al Wasilah di Tasikmalaya, hingga Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Barat untuk memastikan akurasi arah sajadah dan bangunan masjid. (ist. antara)

DEJAVU TRAGEDI MILITER GUDANG AMUNISI MELEDAK DI MADIUN, 1 PRAJURIT TNI TEWAS

Keamanan fasilitas penyimpanan persenjataan dan amunisi milik militer kembali menjadi sorotan. Ledakan hebat yang mengguncang Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad) TNI AD di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Kamis (16/7/2026) pagi, menjadi sebuah dejavu tragis. Peristiwa yang merenggut nyawa satu prajurit TNI dan melukai enam personel lainnya ini seolah memutar kembali pita rekaman buruk dari insiden-insiden serupa yang belum hilang dari ingatan publik. Menjawab kritikan banyak pihak, TNI AD menegaskan sebuah tim khusus telah diterjunkan ke lokasi untuk menyisir sisa-sisa material pascaledakan dan mencari tahu pemicu utama dari tragedi tersebut. BACA HAL 11...

Gupusmu II Puspalad Madiun

- Waktu: 16 Juli 2026
- Lokasi: Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
- Penyebab: Kecelakaan kerja mendadak saat prosedur pemeriksaan & perawatan amunisi.
- Dampak: 1 Prajurit TNI AD gugur, 4 luka berat, 2 luka ringan.

Gudmura Kodam Jaya Ciangsana

- Waktu: 30 Maret 2024
- Lokasi: Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- Penyebab: Diduga gesekan zat kimia pada amunisi sisa latihan/kedaluwarsa.
- Dampak: Gudang hancur (±150 ribu peluru), proyektil terpental ke rumah warga, 0 korban jiwa.

Truk Amunisi Kostrad

- Waktu: Mei 2024
- Lokasi: Jalur Tol KM 774
- Penyebab: Truk pengangkut amunisi mendadak meledak dan terbakar di tengah perjalanan.
- Dampak: Kerugian alutsista, penutupan jalur tol logistik.

Pemusnahan Amunisi Garut

- Waktu: 12 Mei 2025
- Lokasi: Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
- Penyebab: Ledakan tak terduga saat penyusunan detonator disposal amunisi akhir.
- Dampak: 13 orang tewas (4 Prajurit TNI AD & 9 warga sipil).

JEJAK KELAM
LEDAKAN AMUNISI
DI INDONESIA



GROUNDBREAKING USAI 28 TAHUN MANDEK, LNG ABADI MASELA WAJIB SERAP NAKER LOKAL

Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Lapangan Abadi, Blok Masela, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026). Peresmian itu mengakhiri penantian selama 28 tahun sejak proyek gas raksasa tersebut pertama kali dicanangkan. Selain meminta proyek dipercepat, Presiden menegaskan pengembang wajib melibatkan tenaga kerja, pelaku usaha, dan industri dalam negeri agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati investor.

Groundbreaking dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo meminta pembangunan tidak lagi mengalami penundaan mengingat proyek tersebut telah terlalu lama tertahan akibat berbagai persoalan teknis dan kebijakan.

"Alhamdulillah hari ini mulai pembangunan dan pembangunan tidak boleh terhambat harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Prabowo.

Presiden mengingatkan bahwa proyek bernilai ratusan triliun rupiah itu harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitar lokasi maupun perekonomian nasional. Karena itu, ia meminta operator proyek memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri.

"Saya juga minta agar penggunaan tenaga kerja lokal, pengusaha lokal, dan komponen dalam negeri menjadi prioritas. Jangan sampai proyek sebesar ini manfaatnya tidak dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Maluku dan Kepulauan Tanimbar," ujar Prabowo.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada operator proyek, INPEX Corporation, bersama mitranya, Petronas dan PT Pertamina (Persero), yang melanjutkan pengembangan Blok Masela setelah perubahan struktur kepemilikan menyusul keluarnya Shell pada 2023.

Saat ini komposisi kepemilikan Blok Masela terdiri atas INPEX Masela sebesar 65 persen, Pertamina Hulu Energi Masela 20 persen, dan Petronas Masela 15 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek tersebut sempat tertakung-katung selama 28 tahun karena belum adanya kesepakatan mengenai konsep pengembangan, yakni pembangunan fasilitas utama di laut (offshore) atau di darat (onshore).

"Pada hari ini, tepat pada tanggal 16 Juli 2026 kita menandai babak baru Proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu, sudah enam presiden, Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusi hari ini. Saya harus menyampaikan kepada Bapak Presiden karena proyek ini sudah lama tertakung-katung," kata Bahlil.

Blok Masela berada di Laut Arafura, sekitar 750 kilometer di



Presiden RI Prabowo Subianto groundbreaking blok abadi Masela secara daring Kamis (16/7/2026). (ist)

selatan Ambon dan sekitar 12 mil laut dari pulau terdekat. Lapangan gas tersebut menjadi salah satu cadangan gas terbesar Indonesia sekaligus masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.

Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai US\$20,95 miliar atau sekitar Rp377 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Investasi itu mencakup tambahan sekitar US\$1 miliar untuk penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) guna mengurangi emisi karbon.

Lapangan Abadi ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, sekitar 35 ribu barel kondensat per hari, serta 150 juta kaki kubik gas alam per hari untuk mendukung kebutuhan industri.

Proyek gas raksasa yang sempat tertunda selama 28 tahun itu menyerap investasi hampir US\$21 miliar dan diproyeksikan menjadi salah satu penopang ketahanan energi sekaligus industrialisasi nasional.

Prabowo mengatakan proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar US\$20,9 miliar atau hampir US\$21 miliar. Menurut dia, besarnya investasi itu sejalan dengan potensi produksi yang akan dihasilkan Lapangan Abadi di Blok Masela.

"Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar AS, hampir 21 miliar dolar AS. Akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton LNG, kondensat, dan sebagainya," kata Prabowo.

Target Produksi 9 Juta Ton

Selain memproduksi lebih dari 9 juta ton LNG setiap tahun, proyek tersebut juga akan menghasilkan kondensat serta produk gas lainnya

yang diharapkan memperkuat pasokan energi nasional. Dalam dokumen pengembangan proyek, kapasitas produksi LNG dirancang mencapai 9,5 juta ton per tahun, ditambah produksi kondensat sekitar 35 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 150 juta kaki kubik per hari.

Menurut Prabowo, tambahan pasokan energi dari Blok Masela menjadi fondasi penting bagi program hilirisasi yang tengah didorong pemerintah. Industrialisasi, kata dia, tidak mungkin berjalan tanpa dukungan energi yang memadai.

"Kita harus melakukan hilirisasi. Dan hilirisasi ini membutuhkan energi," ujarnya.

Presiden mengatakan Indonesia tengah berupaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pembangunan industri pengolahan di dalam negeri. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi besar, infrastruktur yang memadai, serta ketersediaan energi dalam jangka panjang.

Ia menambahkan, penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut, menurut Prabowo, diperlukan untuk memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, membayar gaji guru dan aparatur negara, serta membangun berbagai infrastruktur publik.

"Kita butuh uang untuk membangun pelayanan kesehatan yang terbaik. Kita butuh uang untuk membayar gaji guru sehingga sekolah kita tidak kalah dengan sekolah di luar negeri," katanya.

Proyek LNG Abadi Masela

FAKTA PROYEK LNG ABADI MASELA

INVESTASI

- Nilai investasi: US\$20,9 miliar (hampir US\$21 miliar) Setara sekitar Rp377 triliun (kurs Rp18.000/US\$)

TARGET PRODUKSI

- LNG: 9,5 juta ton per tahun
- Kondensat: 35.000 barel per hari
- Gas bumi: 150 juta kaki kubik per hari (MMSCFD)

LOKASI

- Lapangan Abadi, Blok Masela.
- Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
- Sekitar 750 km selatan Ambon.

PENGELOLA

- INPEX Masela: 65%
- Pertamina Hulu Energi Masela: 20%
- Petronas Masela: 15%

CATATAN

- Proyek sempat tertunda 28 tahun.
- Groundbreaking dilaksanakan pada 16 Juli 2026.
- Masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).



dikembangkan oleh INPEX Corporation bersama Petronas dan PT Pertamina (Persero). Pemerintah berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat produksi gas nasional sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia.

Prabowo juga menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi masa transisi energi dalam beberapa tahun ke depan. Menurut dia, keberadaan Lapangan Abadi akan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan Indonesia timur. (gus,ist,ant/dya)

ANTREAN BBM MENGULAR DI SUMATRA, DPR: KONSUMEN MIGRASI KE SUBSIDI

Persoalan antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumatra, khususnya di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, membuat banyak pihak ketar-ketir. Kendati Pertamina menegaskan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman, di lapangan warga harus berjuang ekstra keras demi mendapatkan bahan bakar bersubsidi.

Ratusan sepeda motor dan mobil terlihat mengantre untuk mengisi bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di Jalan Setia Budi, Simpang Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Rabu (15/7/2026). (dok.kompas.com)



Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa penumpukan kendaraan di SPBU wilayah Sumatra telah mengganggu aktivitas harian warga. Di Medan, Sumatra Utara, kepadatan kendaraan di area pengisian bahan bakar terpantau sangat padat.

Salah seorang warga Medan, Wahyudi Munthe (31), mengungkapkan keresahannya saat hendak berangkat bekerja. Ia terpaksa mengantre di SPBU Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan, lantaran tangki sepeda motornya sudah hampir kosong.

"Lama lah menunggu, aku rasa ada 30 menit lebih. Siang hari panas juga di sini, jadi lengkap sudah," keluh Wahyudi saat ditemui di lokasi, Senin (13/7/2026).

Selain di Medan, kelangkaan dan antrean panjang juga dilaporkan terjadi di Deli Serdang akibat menipisnya stok Pertalite, serta di wilayah Sumatra Barat. Pertamina sendiri sempat menyampaikan bahwa kendala distribusi di Sumatra Barat salah satunya disebabkan oleh perbaikan jalan dan bencana alam, sementara di Medan dipicu oleh lonjakan permintaan selama periode libur sekolah.

Menanggapi fenomena antrean yang terjadi dalam sepekan terakhir, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada kelangkaan stok nasional, melainkan

adanya pergeseran konsumsi (shifting) masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), Bambang menjelaskan hasil koordinasi DPR dengan pihak otoritas terkait. "Kami bertanya terkait dengan kenapa ada antrean di dalam satu minggu terakhir ini terjadi di berbagai tempat di SPBU, di kota-kota yang ada di Indonesia. Dijelaskan (oleh BP MIGAS dan Pertamina) bahwa terkait dengan antrean tersebut mungkin disebabkan antara lain karena, pertama, adanya shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non-subsidi, beralih kepada BBM subsidi," ujar Bambang.

Tidak hanya faktor migrasi konsumen secara sukarela, DPR juga mengendus adanya praktik ilegal berupa penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dialihkan ke sektor industri demi mencari keuntungan sepihak.

"Kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya," ungkap Bambang.

Mengatasi kebocoran BBM subsidi tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama aparat penegak hukum dilaporkan

telah melakukan tindakan preventif hingga penindakan hukum di lapangan. Bambang Patijaya memastikan pengawasan terus diperketat guna meminimalisasi ruang gerak para pelaku penimbunan.

"Kepala BP MIGAS beserta jajarannya seluruh anggota komite menyampaikan bahwa BP MIGAS juga sudah melakukan kontrol, dan juga sudah melakukan pengawasan. Bahkan sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan, dan kemudian juga dalam kegiatannya juga melibatkan aparat hukum," jelas Bambang.

Guna mengurai kemacetan dan antrean panjang yang merugikan produktivitas masyarakat di Sumatra dan daerah lainnya, Komisi XII DPR RI secara tegas meminta Pertamina Patra Niaga segera mengambil langkah taktis di lapangan.

DPR mendesak adanya penambahan jam operasional SPBU serta optimalisasi armada pengiriman guna mempercepat distribusi BBM.

"Segera untuk mengoptimalkan operasional mereka di dalam pelayanan kepada masyarakat, menambah jumlah jam daripada operasi SPBU. Kemudian juga terkait dengan armada transport itu dapat ditingkatkan, dapat ditambah jumlahnya, sehingga dengan demikian dapat segera menguraikan antrian-antrian yang ada di SPBU," pungkas Bambang. (wid,ist,rls/dya)

Tren Impor Minyak Mentah

2024
16,86 juta ton

2025
17,58 juta ton
(naik 4,31%)

Januari 2026
2,52 juta ton
(naik 161% dibanding Januari 2025 yang 0,96 juta ton)

April 2026
82,52 Persen
Nilai impor migas melonjak secara tahunan.

Kebutuhan Minyak Nasional

TOTAL KONSUMSI:
Sekitar 505 juta
barel per tahun

Produksi domestik
208 juta barel
(41,2%)

Impor minyak mentah
129 juta barel
(25,5%)

Impor BBM jadi
168 juta barel
(33,3%)

Artinya, sekitar 58,8% kebutuhan minyak Indonesia masih bergantung pada impor.

Pemasok Utama BBM Jadi

Singapura
64,23 Persen

Malaysia
27,18 Persen

Oman & Uni Emirat Arab
sisanya

Pemasok Utama Minyak Mentah

Nigeria
26,34 Persen

Angola
21,24 Persen

Arab Saudi
18,13 Persen

BANJIR BARANG BUKTI DARI POLRI, KAPAN FEBRIE DITAHAN?

Penanganan kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, memasuki fase krusial. Sepanjang hari Kamis (16/7/2026), serangkaian pelimpahan barang bukti berskala besar dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengalir ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung). Langkah ini menegaskan estafet penanganan perkara yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Korps Adhyaksa.



Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 17.00 WIB terlihat penyidik membawa boks berwarna putih dan goodie bag berwarna hijau, diduga barang bukti dari Polri untuk Kejaksaan. (ist)

Hingga Kamis sore sekitar pukul 17.00 WIB, penyidik Polri kembali menyambangi Gedung Bundar Kejagung untuk menyerahkan dokumen dan material penting terkait tiga klaster kasus korupsi yang menyeret Febrie. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah boks berat bertutup hijau dan goodie bag logistik langsung dibawa masuk ke ruang penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan aktivitas tersebut. "Itu masih bagian dari penyerahan barang bukti dalam tiga perkara dari penyidik Polri ke penyidik Kejagung," ujar Anang.

Gelombang pelimpahan ini dipastikan belum berakhir. Pada Jumat (17/7/2026) esok, penyidik Kortas Tipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dijadwalkan

melimpahkan secara resmi tersangka Don Ritto Handika Honggowongso alias Idon—yang diduga kuat merupakan operator atau penghubung dalam lingkaran kasus ini.

Bersama penyerahan Don Ritto, aparat akan menyerahkan barang bukti fantastis berupa uang tunai senilai Rp67,2 miliar (dalam pecahan rupiah, USD, dan SGD) serta 74 kilogram emas yang disita dari operasional kafe dan money changer miliknya di Jakarta Selatan.

Meskipun demikian, kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, bersikeras membantah keterlibatan kliennya. Ia mengklaim bahwa dana puluhan miliar tersebut murni modal kerja sama proyek dermaga di Kalimantan Timur dan tidak berkaitan dengan skandal yang menimpa Febrie.

Kasus yang menimpa Febrie tidak

berdiri tunggal. Kejagung kini telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk mendalami gurita perkara yang dilimpahkan dari kepolisian. Konstruksi hukum difokuskan pada tiga sektor strategis.

Dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Korupsi pengadaan batu bara untuk PLTU PLN yang diduga memiliki korelasi kuat dengan insiden padamnya listrik massal (blackout) di beberapa wilayah. Dan Pendalaman lanjutan atas kasus mega korupsi PT ASABRI, khususnya yang menyangkut tindak lanjut penyelesaian utang korporasi swasta (PT CBS kepada PT KNI).

Untuk mengomandoi pembuktian perkara kakap ini, Kejagung telah membentuk "Tim 9"—sebuah tim khusus beranggotakan sembilan jaksa senior, di mana beberapa di antaranya merupakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki rekam jejak panjang dalam mengurai TPPU lintas sektor.

Kendati status tersangka Febrie Adriansyah telah dikonfirmasi ulang oleh pihak internal melalui tiga Sprindik baru, kebijakan Kejagung untuk belum melakukan penahanan fisik memicu polemik. Hingga pertengahan Juli 2026, eks Jampidsus tersebut diketahui masih bebas dari penahanan.

PASANG SURUT STATUS HUKUM FEBRIE ADRIANSYAH

Penerbitan Sprindik Awal (Awal Kasus)

- Kejagung menerbitkan Sprindik kasus PT ASABRI, PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara PLN. Nama Febrie Adriansyah mulai terseret.

Kejutan Status "Saksi Only" (Fase Redup)

- Kejagung sempat menyatakan Febrie hanya berstatus saksi dalam pendalaman perkara.

Penerbitan 3 Sprindik Baru (Tersangka Lagi)

- Tiga Sprindik baru diterbitkan. Status Febrie kembali menjadi tersangka dugaan korupsi dan TPPU.

Benturan Polemik: "Tersangka Tapi Bebas"

- Meski berstatus tersangka, Febrie tidak ditahan karena dinilai kooperatif, tidak berisiko menghilangkan barang bukti, dan telah dicegah ke luar negeri.

Sorotan Publik dan Kritik Tajam

- LSAK dan pengamat hukum menilai langkah Kejagung tidak konsisten serta memunculkan dugaan adanya sikap ewuh pakewuh dalam penanganan perkara.



Merespons sorotan tersebut, Kapuspenkum Anang Supriatna menegaskan bahwa belum ada alasan objektif maupun subjektif yang mendesak. Penyidik meyakini bahwa Febrie akan bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan.

"Enggak (khawatir merusak barang bukti), kita yakin. Beliau ada kok. Kapan saja tinggal diperiksa saja. Saya yakin beliau masih ada di Indonesia," kata Anang. Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan bepergian ke luar negeri telah diterbitkan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga potensi melarikan diri dinilai minim. Fokus tim saat ini diklaim murni pada penguatan alat bukti dan pemetaan utuh konstruksi perkara.

Kebijakan internal Kejagung dalam mengusut mantan pejabat terasnya sendiri memicu respons kritis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat. Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) secara terbuka mengkritik keras dinamika penyampaian informasi dari Kejagung yang dinilai membingungkan publik terkait kepastian status hukum Febrie. (wid,ist/dya)



ARAB SAUDI JAJAKI BANDARA DHOHO JADI EMBARKASI HAJI DAN UMRAH

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mulai menjajaki pemanfaatan Bandara Internasional Dhoho di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai embarkasi dan debarkasi jemaah haji maupun umrah mulai 2027. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas layanan penerbangan langsung menuju Jeddah dan Madinah sekaligus mengurangi beban operasional Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo yang selama ini menjadi pintu utama keberangkatan jemaah asal Jawa Timur.

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/7). Sebelumnya, Dudy telah membahas peluang kerja sama itu bersama Menteri Transportasi dan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jasser di Jakarta pada Senin (13/7).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Arab Saudi dijadwalkan mengirim tim teknis dalam waktu dekat untuk melakukan survei dan menilai kesiapan Bandara Dhoho sebagai bandara yang melayani penerbangan langsung menuju Arab Saudi.

"Beberapa hari yang lalu, kami sudah bicara dengan Kementerian Transportasi dan Logistik Saudi dan mereka berkeinginan untuk bisa menggunakan Bandara Dhoho. Mungkin dalam waktu dekat mereka akan mengirim tim untuk menjajaki pemanfaatan Bandara Dhoho sebagai bandara yang melayani penerbangan langsung dari Jawa Timur ke Saudi Arabia," kata Dudy dikutip Kamis (16/7).

Menurut Dudy, ketertarikan pemerintah Arab Saudi muncul setelah melihat potensi Bandara Dhoho sebagai alternatif embarkasi haji dan umrah yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan bagi masyarakat Jawa Timur. Jika seluruh persyaratan teknis terpenuhi, bandara yang dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk. tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu diproyeksikan menjadi gerbang baru penerbangan langsung menuju Jeddah dan Madinah.

Bandara Dhoho juga diharapkan memperkuat layanan penerbangan internasional di Jawa Timur dengan melengkapi peran Bandara Juanda yang selama ini menampung jemaah dari berbagai provinsi di Indonesia timur.

Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan revitalisasi Bandara Juanda. Peningkatan infrastruktur difokuskan pada landasan pacu agar mampu melayani pesawat berbadan lebar (wide body), sehingga penerbangan langsung ke Arab Saudi dapat dilakukan dengan kapasitas yang lebih besar.



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) menerima kunjungan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kiri) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Rabu (16/7/2026). (Biro Adpim Pemprov Jatim)

"Diharapkan Bandara Juanda bisa menampung pesawat-pesawat berbadan besar sehingga bisa digunakan oleh masyarakat Jawa Timur. Khususnya, seperti bisa terbang langsung ke Jeddah dan Madinah untuk melayani masyarakat

Jawa Timur yang akan melaksanakan ibadah umrah dan haji," ujar Dudy.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keberadaan embarkasi baru di Kediri akan memberikan manfaat besar, terutama bagi masyarakat di kawasan

Mataraman yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju Surabaya sebelum berangkat ke Tanah Suci.

"Seluruh persiapan terus kami lakukan bersama Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, juga seluruh pihak terkait agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi dengan baik," kata Khofifah.

Menurut Khofifah, pemerintah provinsi telah mempersiapkan pemanfaatan Bandara Dhoho untuk layanan haji dan umrah sejak beberapa tahun terakhir. Kehadiran bandara tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memangkas waktu perjalanan calon jemaah.

"Bandara Dhoho ini sudah lama kami persiapan untuk memperkuat layanan penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memberikan kemudahan bagi jemaah, khususnya dari wilayah Mataraman. Kami berharap proses keberangkatan maupun kepulangan jemaah akan semakin efektif dan nyaman," ujarnya.

Embarkasi Dhoho diproyeksikan melayani sekitar 10.548 jemaah haji yang berasal dari 15 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Blitar, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Kabupaten dan Kota Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Jombang, serta Bojonegoro. (wid,ist,rls/dya)

Pemerintah Usulkan Skema Biaya 2027 Tetap 60:40



Deputi III Bakom RI Kurnia Ramadhana

haji di Arab Saudi.

Usulan itu telah disampaikan kepada DPR RI sebagai bagian dari pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.

Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Kurnia Ramadhana mengatakan pemerintah tetap mempertahankan

formula pembiayaan tersebut untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.

"Untuk skema pembiayaannya, pemerintah tetap mengusulkan komposisi 60 persen dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH dan 40 persen dari nilai biaya perjalanan ibadah haji guna meringankan beban riil jemaah sekaligus mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi," ujar

Kurnia Ramadhana dalam jumpa pers di Kantor Bakom RI.

Menurut Kurnia, persiapan penyelenggaraan haji 2027 telah dimulai lebih awal dengan menyesuaikan jadwal yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah telah menyusun tahapan pelaksanaan, termasuk penyusunan usulan BPIH beserta rincian pembiayaannya yang kini sedang dibahas bersama DPR.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Beberapa di antaranya meliputi penyusunan perencanaan berdasarkan asumsi kuota, penguatan pemeriksaan kesehatan atau istitha'ah calon jemaah, penyusunan skema pendanaan apabila terjadi kekurangan biaya penerbangan, percepatan negosiasi dengan penyedia layanan haji di Arab Saudi, hingga percepatan pengalihan aset Barang Milik Negara (BMN) yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji. (wid,rla/dya)

Kurangi Sampah, Pemkot Malang Usulkan Pendanaan Autothermix



Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang. (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melirik teknologi pengolahan sampah menggunakan uap atau autothermix sebagai salah satu solusi mengurangi timbunan sampah. Inovasi itu kini tengah diusulkan kepada pemerintah pusat melalui skema Local Service Delivery Project (LSDP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan harapan

memperoleh dukungan pendanaan.

"Kami mencoba mengusulkan untuk pengolahan sampah yang menggunakan anggaran dari LSDP itu dengan menggunakan uap. Bukan dibakar, tetapi dengan uap arang, s e b u t a n n y a autothermix," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, autothermix merupakan teknologi pengolahan sampah yang berbeda dengan insinerator karena tidak menggunakan proses pembakaran secara langsung.

"Ini bukan insinerator. Bukan dibakar, tetapi menggunakan uap dari arang. Arang dimasukkan ke dalam alat, kemudian menghasilkan uap yang

dimanfaatkan dalam proses pengolahan. Teknologi ini disebut autothermix," katanya.

Raymond menjelaskan, inovasi tersebut tergolong baru dan telah diterapkan di beberapa daerah maupun institusi pendidikan, di antaranya di Bogor dan Politeknik Semarang. Pemkot Malang pun melihat potensi teknologi tersebut untuk mendukung pengolahan sampah dalam skala yang lebih besar.

Melalui skema LSDP, Pemkot Malang mengusulkan kapasitas pengolahan sampah mencapai 100 hingga 150 ton per hari. Namun, proses pengajuan masih terus berlanjut karena terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

"Perkembangan terakhir, pemerintah daerah harus memastikan kesiapan biaya operasional untuk program LSDP tersebut," katanya.

Selain mengusulkan teknologi baru, DLH Kota Malang juga terus mengoptimalkan pengelolaan sampah

dari sumbernya melalui proses pemilahan.

Raymond menyebut, komposisi dari hampir 700 ton sampah yang dihasilkan di Kota Malang per harinya, masih didominasi sampah organik. Jenis sampah tersebut diolah menjadi kompos sebagai bagian dari upaya mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Sementara itu, sampah anorganik dipilah sesuai jenis dan nilai ekonominya. Material yang masih memiliki nilai jual, lanjut Raymond, akan dimanfaatkan kembali sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Adapun limbah plastik yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis turut dimanfaatkan melalui proses pengolahan menjadi bahan bakar. "Kami memanfaatkan plastik-plastik yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis untuk diolah menjadi solar dengan kualitas mendekati Perta Dex, bahkan di atas Dexlite," ungkapnya. (Santi/Dya)

Debit Air Menurun, BPBD Malang Waspada Bencana Kekeringan

MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Pasalnya sejumlah wilayah di Kabupaten Malang dilaporkan mengalami tanda-tanda penurunan debit air.

"Kini fokus kami beralih dari hidrometeorologi ke siap siaga bencana kekeringan. Kami sudah menerima laporan dari Kecamatan Sumbermanjing Wetan terkait potensi kekeringan di tiga desa, yakni Desa Sitiarjo, Desa Kedungbanteng, dan Desa Sumberagung," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Kamis (16/7/2026).

Dijelaskannya, hasil monitoring di Desa Sitiarjo dan Kedungbanteng menunjukkan debit air pada sumur warga mulai mengalami penurunan. Meski demikian, ketersediaan air bersih masih dinilai mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berbeda dengan kondisi di Desa Sumberagung yang selama beberapa tahun terakhir menjadi wilayah

langganan kekeringan dan rutin menerima bantuan distribusi air bersih dari pemerintah daerah.

Menurut Sadono, sekitar 2 pekan sebelum dilakukan monitoring, debit air dari sumber mata air (belik) maupun sumur warga di wilayah tersebut telah menyusut hingga tersisa sekitar 30 persen dari kondisi normal. "Kondisi itu terjadi di RT 13 dan RT 14 RW 2 Dusun Krajan," jelasnya.

Sadono mengatakan, sisa debit air tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok seperti memasak dan air minum. Namun, untuk keperluan lain, seperti mencuci pakaian, warga harus mengambil air ke Sungai Mbambang yang berjarak sekitar 1,5 kilometer dari permukiman.

Dalam pemberitaan sebelumnya, sejak awal musim kemarau 2026, BPBD Kabupaten Malang telah memetakan sedikitnya 6 dusun yang berpotensi mengalami kekeringan.

Wilayah tersebut meliputi Dusun Krajan dan Dusun Semampir di Desa

Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan; Dusun Bandaragin di Desa Sumberejo, Kecamatan Pagak; Dusun Sumberkotes Kulon di Desa Segaran dan Dusun Pohcek di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan; serta Dusun Sumbermaron di Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare.

BPBD juga meminta pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Apabila ditemukan indikasi penurunan ketersediaan air bersih, pemerintah wilayah diminta segera melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten Malang dengan tembusan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) serta Perumda Tirta.

Menurut Sadono, laporan tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat



Arsip-BPBD Kabupaten Malang mendistribusikan air bersih di wilayah terdampak kekeringan. (foto: Pusdalops BPBD Kab. Malang)

kekeringan, selain hasil asesmen lapangan dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Apabila status tanggap darurat ditetapkan, BPBD akan segera mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.

Dalam penanganan kekeringan, Sadono menyebut pihaknya telah membagi tingkat kerawanan menjadi 3 kategori, yakni kering kritis, kering langka, dan kering langka terbatas. (Santi/Dya)



Polisi akhirnya berhasil menangkap tiga tersangka utama yang menjadi motor penggerak sindikat ini. (ist.dok)

THAILAND DIGUNCANG SKANDAL SUAP SELEKSI ASN, 5.814 BAKAL DIPECAT

Tiga komplotan mafia ujian tertangkap memanipulasi nilai elektronik ribuan aparatur sipil negara di Thailand. Pemerintah Thailand langsung mengambil tindakan tegas menyusul terbongkarnya skandal suap massal ini. Sebanyak 5.814 pegawai negeri sipil (PNS) kini menghadapi ancaman pemecatan dan skorsing massal karena kecurangan saat mengikuti seleksi masuk dan promosi jabatan tahun 2025 tersebut.

Aparat kepolisian bersama lembaga antikorupsi setempat membongkar praktik culas ini setelah menggelar penyelidikan maraton selama 17 hari. Petugas menyita sejumlah komputer dan dokumen penting, serta menahan tiga orang yang menjadi otak di balik manipulasi sistem tersebut.

Investigasi sejak Juni lalu mendapati bahwa para calo memungut uang pelicin yang sangat besar dari para peserta. Ribuan kandidat membayar suap bervariasi mulai dari 350.000 hingga 800.000 baht (sekitar Rp 428 juta atau US\$ 23.847) per orang, tergantung pada basahnya posisi yang mereka incar.

Komisaris Biro Investigasi Pusat, Letnan Jenderal Polisi Nathasak Chaonasai, membeberkan bahwa para pelaku menyulap nilai ribuan peserta ujian secara elektronik di sebuah rumah milik salah satu tersangka di provinsi Nonthaburi. Untuk melancarkan aksi ini, para dalang kecurangan bersekongkol dengan 11 pegawai negeri sipil yang bertugas mengubah nilai para peserta.

Sebagai imbalan uang ratusan juta tersebut, para oknum mendongkrak hasil ujian korban pada sistem elektronik agar otomatis lolos tes wajib, baik untuk pengangkatan menjadi pejabat pemerintah daerah baru maupun promosi naik pangkat. Ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Administrasi Lokal (DLA) pada akhir tahun lalu itu sendiri diikuti oleh sekitar 400.000 orang yang memperebutkan

6.700 posisi.

Polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas tiga tersangka utama yang menjadi motor penggerak sindikat ini. Mereka adalah Win Thanaphatcharaphokin, penasihat direktur Kantor Promosi dan Pelatihan di Universitas Kasetsart. Ada juga Sataporn Thanaphatcharaphokin, adik perempuan Win dan Pichit Thangphrom, mantan direktur Divisi Strategi dan Anggaran Kotamadya Wichian Buri di provinsi Phetchabun (pemilik rumah tempat manipulasi nilai di Nonthaburi).

Pengejaran polisi terhadap para gembong ini sempat mewarnai drama pelarian lintas negara. Salah satu tersangka sempat kabur menyeberangi perbatasan menuju Laos sebelum akhirnya tim buru sergap menangkapnya.

Kini, ketiga tersangka utama dan 11 pejabat yang membantu mereka menghadapi dakwaan berlapis minggu depan, mulai dari perkumpulan ilegal, pemalsuan dokumen resmi, hingga memasukkan informasi palsu ke dalam sistem komputer. Mereka terancam denda besar dan hukuman penjara hingga lima tahun. Polisi juga tengah memburu oknum yang membocorkan berkas nilai ujian asli kepada Pichit.

Kementerian Dalam Negeri Thailand tidak mau setengah-setengah dalam membersihkan institusinya. Mereka menerjunkan tim untuk mengaudit ulang lembar soal dan jawaban ujian

guna memetakan seberapa parah kebocoran sistem yang terjadi.

Sekretaris Tetap Kementerian Dalam Negeri, Unsit Sampuntharat, memastikan polisi telah memegang bukti kuat terkait penyimpangan nilai ini. Dari total 15.000 pejabat pemerintah daerah baru yang dipekerjakan tahun ini, sekitar 5.000 di antaranya terbukti curang dan dipastikan akan kehilangan pekerjaan mereka.

"Kerugiannya sangat besar, dan itu tidak adil bagi mereka yang mendapatkan posisi mereka dengan cara jujur. Kami akan menskorsing mereka sembari menunggu keputusan komite paling cepat pada hari Jumat. Setiap orang yang terbukti terlibat dalam kecurangan ujian akan menghadapi tindakan hukum," tegas Unsit Sampuntharat di hadapan media, Kamis (16/7/2026).

PM Thailand Murka

Aksi curang massal ini memantik kemarahan Perdana Menteri Thailand yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Anutin Charnvirakul. Mengingat kementeriaannya mengawasi langsung DLA yang menjadi pusat skandal, Anutin berjanji akan membuka seluruh kebenaran kepada publik dan menindak tegas semua pihak tanpa pandang bulu.

Saat wartawan mencecar pertanyaan mengenai isu keterlibatan jaringan kecurangan ini dengan tokoh-tokoh senior di Partai Bhumjaithai—partai yang menaunginya—Anutin menjawab dengan lugas dan tegas.

"Tentu saja, jika mereka anggota partai, tidak akan ada pengecualian. Siapa pun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum dan dituntut! Jika melibatkan siapa pun, tindakan akan diambil terhadap mereka semua," ujar PM Anutin Charnvirakul.

Ia mengecam keras bobroknya mentalitas para pegawai dan menganggap skandal ini sebagai hal yang menjijikkan bagi dunia birokrasi karena berpotensi menciptakan korupsi lanjutan.

"Ini membentuk lingkaran setan. Para pejabat menggunakan cara-cara korup hanya untuk mendapatkan posisi kekuasaan dan tanggung jawab. Cara kotor seperti ini justru membuka peluang baru bagi mereka untuk melakukan korupsi yang jauh lebih besar di masa depan," tambah Anutin. (wid,ist,cnn/dya)



Ini membentuk lingkaran setan. Para pejabat menggunakan cara-cara korup hanya untuk mendapatkan kekuasaan... Cara kotor ini justru membuka peluang baru untuk korupsi yang jauh lebih besar."

Anutin Charnvirakul
Perdana Menteri & Menteri Dalam Negeri Thailand



Rahasia Tren Kaus Kaki Bolong Pesepakbola Jude Bellingham

Dalam beberapa musim kompetisi sepakbola profesional terakhir, sebuah fenomena visual yang tidak biasa pada perlengkapan bertanding para atlet elite dunia kian menyita perhatian publik dan analis olahraga. Sejumlah pemain pilar di kancah internasional, seperti Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Mason Holgate, secara konsisten tampil di lapangan dengan kondisi

bagian belakang kaus kaki yang sengaja dilubangi.

Meskipun dari sudut pandang estetika konvensional modifikasi tersebut memberikan kesan tidak rapi, tindakan mekanis ini nyatanya didasari oleh pertimbangan medis yang rasional serta upaya optimasi performa fisik di lapangan hijau.

Laporan teknis yang dirilis oleh media olahraga The Athletic

mengonfirmasi bahwa modifikasi struktur pakaian ini berkaitan erat dengan pemenuhan standar kenyamanan dan antropometri para pemain. Secara fabrikasi, kaus kaki sepakbola modern diproduksi massal menggunakan material poliester sintetis.

Karakteristik utama dari material ini adalah kemampuannya yang tinggi dalam menahan bentuk agar tidak mudah mengendur, sekaligus memiliki daya serap air yang besar saat terpapar keringat atau hujan. Kendati demikian, tingkat kompresi elastisitas yang dihasilkan oleh poliester baru sering kali terlalu ketat, sehingga berisiko membatasi ruang gerak fisiologis otot-otot kaki bagian bawah.

Mitigasi Risiko Gangguan Cedera

Secara anatomi dan fisiologi olahraga, otot betis (gastrocnemius dan soleus) pesepakbola profesional mengalami hipertrofi atau pembesaran volume akibat beban latihan serta tuntutan gerakan lari cepat (sprint) yang eksponensial. Ketika kompartemen otot yang membesar ini tertekan oleh rajutan poliester ketat dalam durasi panjang, tekanan hidrostatik eksternal dapat mengganggu sirkulasi darah mikro. Pembuatan lubang-lubang strategis pada area betis dipercaya oleh para pemain mampu mereduksi tekanan konstiksi eksternal tersebut secara signifikan.

Langkah reduksi tekanan ini bertujuan untuk melancarkan aliran darah balik (vena) yang membawa oksigen, mempercepat proses klirens asam laktat, serta mempertahankan

elastisitas otot. Melalui mekanisme pembebasan tekanan ini, risiko terjadinya kram otot prading, kelelahan dini (fatigue), hingga cedera tarikan otot (strain) pada fase-fase krusial pertandingan dapat diminimalisasi secara preventif. Hal ini menjadi sangat vital mengingat intensitas kompetisi modern menuntut mobilitas fisik yang tinggi sepanjang sembilan puluh menit penuh.

Dampak Psiko-Fisiologis

Di samping determinan klinis yang berfokus pada anatomi tubuh, modifikasi terhadap perlengkapan bertanding ini juga menyentuh dimensi psikologis atlet profesional. Mantan penyerang West Ham United, Frank Nouble, menyatakan bahwa fleksibilitas dalam memodifikasi kaus kaki memberikan ruang bagi para pemain untuk mengekspresikan individualitas mereka di tengah standardisasi regulasi seragam yang baku.

Faktor psikologis ini secara tidak langsung memiliki korelasi linear terhadap tingkat kepercayaan diri dan kesiapan mental seorang atlet saat berkompetisi.

Rasa nyaman yang bersifat subjektif di lapangan terbukti mampu mengeliminasi distraksi mental minor yang berpotensi memengaruhi fokus pemain. Dengan memastikan aspek kenyamanan fisik berada pada level optimal melalui modifikasi pakaian, aspek motorik dan pengambilan keputusan taktis pemain di lapangan dapat berjalan tanpa hambatan mekanis. (far,ist/dya)

Tips Memilih Kaus Kaki yang Nyaman

Pilih Material Sesuai Aktivitas:

Gunakan bahan sintetis (nylon, polyester, spandex) untuk olahraga agar keringat terserap baik dan bebas lecet. Gunakan campuran katun dan serat elastis untuk kenyamanan harian.

Perhatikan Elastisitas:

Pastikan karet atas pas di kaki dan tidak terlalu ketat agar sirkulasi darah tetap lancar.

Sesuaikan Ketebalan (Cushioning):

Pilih bantalan tebal di tumit dan jari untuk olahraga (meredam benturan), serta bahan tipis untuk sepatu formal/harian (agar tidak sempit).

Pastikan Ukuran Pas:

Hindari kaus kaki longgar karena memicu gesekan luka, dan hindari yang sempit karena membatasi gerak jari.

Cek Jahitan Jari (Seamless):

Pilih jahitan datar atau tanpa jahitan di ujung jari untuk mencegah iritasi dan lecet saat bergesekan dengan sepatu.



Kenapa Kunang-kunang Makin Langka? Ini Penjelasan Ilmuwan

Lampyridae, atau yang secara umum dikenal sebagai kunang-kunang, kini mengalami penurunan populasi secara signifikan di berbagai habitat alamnya. Fenomena hilangnya serangga nokturnal ini dari ruang terbuka hijau bukan sekadar hilangnya eksotika visual malam hari, melainkan sebuah alarm ekologis yang mengindikasikan terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan pada skala makro.

Dosen sekaligus peneliti entomologi dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University, Upik Kesumawati Hadi, menjelaskan bahwa Lampyridae mengemban peran krusial sebagai bioindikator ekosistem.

"Kunang-kunang merupakan bioindikator, yaitu organisme yang keberadaan atau ketidakhadirannya dapat mencerminkan kesehatan suatu

ekosistem. Ketika kualitas lingkungan memburuk, populasinya akan cepat menyusut bahkan menghilang," papar Upik.

Gejala penurunan densitas populasi ini tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah dikategorikan sebagai fenomena global. Berdasarkan data resmi dari International Union for Conservation of Nature (IUCN), hasil evaluasi menunjukkan bahwa sekitar 11 hingga 20 persen spesies Lampyridae di dunia saat ini berada dalam status terancam punah.

Di kawasan Asia Tenggara, sejumlah takson spesifik yang mengokupasi ekosistem mangrove di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Thailand kini telah diklasifikasikan ke dalam kategori rentan (vulnerable). Di dalam negeri, berbagai kajian entomologi mengonfirmasi bahwa laju penurunan populasi paling drastis

terdeteksi di kawasan urban.

Alih Fungsi Lahan hingga Polusi Cahaya

Sebagai organisme yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi (stenotopik) terhadap fluktuasi parameter lingkungan, seperti tingkat kelembapan substrat tanah hingga kontaminasi polutan kimi, Lampyridae sangat rentan terhadap gangguan antropogenik. Para peneliti mengidentifikasi bahwa destruksi dan fragmentasi habitat menjadi determinan utama dari krisis populasi ini.

Alih fungsi lahan basah, kawasan rawa, dan agroekosistem persawahan menjadi zona permukiman komersial serta kawasan industri secara langsung memutus siklus hidup serangga ini. Fase larva Lampyridae bersifat

terestrial dan membutuhkan kondisi tanah dengan porositas serta kelembapan tinggi untuk memburu mangsa dan berkembang.

Proses semenisasi tanah dan pengerasan permukaan bumi menggunakan aspal secara otomatis mengeradikasi mikrokosifat yang menunjang sintasan fase pradewasa mereka.

Di samping destruksi pada stratum tanah, intervensi manusia terhadap atmosfer malam melalui polusi cahaya (light pollution) mempercepat degradasi populasi. Masifnya modernisasi perkotaan memicu penggunaan lampu Light Emitting Diode (LED) berspektrum luas dengan intensitas tinggi untuk pencahayaan luar ruangan.

Secara biologis, polusi cahaya mengacaukan sistem komunikasi visual reproduktif serangga ini. Lampyridae mengandalkan mekanisme bioluminesensi--sinyal cahaya ritmis yang diproduksi secara kimiawi dari organ abdomen--untuk atraksi seksual dan lokalisasi pasangan. Kehadiran luminans buatan dengan intensitas tinggi mengaburkan sinyal pendaran alami tersebut.

Akibatnya, individu jantan mengalami disorientasi dan gagal mendeteksi respons dari individu betina, yang berujung pada kegagalan reproduksi massal.

Faktor eksternal lain yang turut mengeskalasi laju penurunan ini meliputi aplikasi insektisida sintetik berspektrum luas yang meracuni rantai makanan, anomali iklim yang memicu kekeringan mikro pada serasah hutan, serta modifikasi saluran irigasi alami menjadi saluran beton yang merusak hidrologi habitat.

Berdasarkan pemetaan ekologi saat ini, koloni Lampyridae yang tersisa hanya dapat dijumpai pada wilayah-wilayah dengan pemukiman minim pencemaran, memiliki fluks cahaya buatan yang rendah, serta kelembapan yang terjaga. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

FILOSOFI WARNA RAMBUT TIMELESS

Siklus tren kecantikan berputar begitu cepat, melahirkan gaya-gaya instan yang kerap memudar hanya dalam hitungan bulan. Hari ini dunia mengagumi satu warna, esok pagi perhatian publik sudah berpindah ke palet baru yang berbeda. Namun, di tengah riuh pergantian tren tersebut, sejumlah warna rambut klasik tetap bertahan kokoh di puncak popularitas.

Laporan dari media mode global seperti Vogue dan Who What Wear mengonfirmasi bahwa pergeseran tren kecantikan tahun ini justru kembali memuja kesederhanaan yang mahal—sebuah gerakan estetika yang mengutamakan kesehatan helai rambut dan pantulan cahaya alami dibanding perubahan warna ekstrem yang merusak batang rambut.

Quiet Luxury Brunette

Konsep kesederhanaan kelas atas atau quiet luxury kini sepenuhnya menguasai ranah pewarnaan rambut global melalui kehadiran warna cokelat mewah (quiet luxury brunette).

Keindahan warna ini terletak pada dimensinya yang sangat kaya tanpa terlihat mencolok, menjadikannya pilihan favorit bagi mereka yang mengedepankan keanggunan berkelas. Jay Blitsas, penata warna kawakan dari Larry King South Kensington menegaskan, "Warna cokelat alami dengan dimensi mikro yang halus melahirkan kilau rambut yang mewah tanpa perlu berteriak mencari perhatian."

Penerapan nuansa cokelat hangat, atau chocolate brunette, juga bertindak aktif dalam menonjolkan binar mata seseorang. James Samuel dari Hershesons Belgravia menambahkan bahwa pemilihan nuansa ini sangat krusial bagi karakter wajah.

"Warna-warna hangat ini memberi kedalaman visual yang lembut

sekaligus menghindari kesan wajah yang terlihat kuyu atau pucat akibat warna rambut yang terlalu dingin," jelas Samuel kepada Cosmopolitan.

Buttercream Blonde

Keanggunan yang bersahaja kini merambah ke ranah rambut pirang, menggeser dominasi warna pirang platinum yang cenderung dingin dan berisiko merusak folikel rambut. Sebagai gantinya, warna pirang creamy hangat atau buttercream blonde kini menjadi pilihan utama para pencinta estetika klasik.

Selebriti penata rambut Melissa Timperley menggambarkan warna ini sebagai bentuk modernisasi dari gaya klasik yang sangat ramah terhadap kesehatan rambut.

Katie Freedman, pakar warna dari Larry King Notting Hill, mengamini hal tersebut dengan menekankan aspek kepraktisan perawatannya yang ramah untuk aktivitas harian, "Buttercream blonde bekerja selaras dengan pigmen alami rambut Anda, sehingga ketika rambut baru tumbuh, transisi warnanya terlihat sangat halus dan tidak meninggalkan batas kontras yang mengganggu."

Low-Maintenance Highlights

Bagi wanita modern dengan agenda harian yang padat, mengunjungi salon setiap tiga minggu sekali tentu bukan pilihan yang ideal. Oleh karena itu, teknik low-maintenance highlights atau lived-in highlights terus bertahan di puncak popularitas gaya hidup urban yang dinamis.

Dean Harris, spesialis pewarnaan rambut dari Marylebone, melukiskan teknik ini sebagai perpaduan antara seni tingkat tinggi dan efisiensi waktu karena berfokus pada transisi warna

lembut yang meniru efek alami rambut saat terpapar sinar matahari musim panas secara organik. "Ini adalah tampilan rambut yang santai namun tetap berkelas, layaknya ketenangan Minggu pagi yang nyaman dengan secangkir kopi hangat di tangan Anda."

Inky Black

Kekuatan karakter warna rambut juga terpancar kuat lewat kembalinya tren rambut gelap legendaris, inky black. Berbeda dengan hitam pekat konvensional yang sering kali membuat wajah terlihat datar, kaku, dan berat, inky black menggunakan dasar cokelat paling gelap yang sangat kaya akan pigmen pemantul cahaya.

Penata rambut ternama Tom Smith menjabarkan rahasia di balik kemewahan warna rambut gelap ini dengan sangat saksama. Menurut

nya, daya tarik utama dari warna hitam berkilau bukan hanya terletak pada intensitas warnanya, tetapi juga pada cara warna tersebut berinteraksi dengan cahaya. "Rahasia dari keindahan warna hitam berkilau ini terletak pada kemampuannya untuk mengelabui mata. Warna ini memanfaatkan kehangatan dasar cokelat espresso yang memberikan dimensi alami pada rambut, sehingga hasil akhirnya tidak terlihat datar atau kusam. Justru sebaliknya, rambut tetap tampak hidup, memiliki kedalaman warna yang elegan, serta mampu memantulkan kilau bagaikan cermin saat terkena cahaya. Efek inilah yang menciptakan kesan mewah, sehat, dan berkelas pada keseluruhan penampilan rambut." (far,ist/dya)



Dejavu Tragedi ..dari Hal 1

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, insiden bermula sekitar pukul 08.45 WIB. Kompleks Gupusmu II Saradan yang biasanya dijaga ketat dengan aktivitas internal yang terukur, mendadak diguncang oleh satu dentuman tunggal yang sangat masif. Disusul oleh getaran kuat yang terasa hingga radius beberapa kilometer di luar pagar pembatas pos komando.

Kepulan asap tebal berwarna kelabu pekat langsung membubung tinggi ke langit Saradan, memicu kepanikan tidak hanya bagi personel di dalam kompleks, melainkan juga warga desa yang bermukim di sekitar perbatasan instalasi militer tersebut.

Mengingat karakteristik kompleks yang menyimpan berbagai jenis amunisi taktis, pihak TNI AD segera melakukan langkah-langkah darurat. Penutupan akses jalan di sekitar pangkalan dan sterilisasi radius aman langsung diberlakukan guna mengantisipasi efek karambol berupa ledakan susulan yang dapat melontarkan proyektil ke pemukiman warga sipil.

Akibat fatalitas dari titik episentrum ledakan, sejumlah personel yang sedang bertugas di dalam bunker penyimpanan menjadi korban langsung. Tercatat 1 prajurit TNI AD gugur di tempat akibat luka parah terkena dampak destruktif ledakan. Sementara itu, 6 personel lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Dengan rincian 4 personel mengalami luka berat akibat trauma ledakan (blast injury) serta luka bakar serius, dan 2 personel lainnya mengalami luka ringan.

Seluruh korban segera dievakuasi menggunakan ambulans militer dan dikawal ketat menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban, Kabupaten Madiun. Guna menjaga kondusivitas penanganan medis serta sterilisasi informasi, Detasemen Polisi Militer (Denpom) TNI langsung menyalurkan personel di area Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Caruban. Langkah pengamanan berlapis ini diambil untuk menjaga privasi medis korban sekaligus membatasi penyebaran data intelijen pertahanan dari lapangan selama masa tanggap darurat berjalan.

Mabesad Janji Investigasi Akuntabel

Menanggapi situasi yang dengan cepat menjadi perhatian nasional, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk memberikan clarification awal sekaligus meredam spekulasi liar di ruang publik. Kepala



Sejumlah personel TNI bersiaga di sekitar RSUD Caruban Kabupaten Madiun setelah kejadian ledakan di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) milik TNI-AD yang berlokasi di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (16/7/2026). (ANTARA)

Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengonfirmasi bahwa insiden fatal ini terjadi di tengah pelaksanaan tugas kedinasan yang terjadwal secara resmi.

"Insiden terjadi saat personel tengah melakukan prosedur pemeliharaan rutin materiil amunisi. Kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit terbaik kami dalam mengemban tugas," ujar Brigjen TNI Donny Pramono dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (16/7/2026).

Merespons berbagai pertanyaan kritis mengenai kelaikan sistem proteksi gudang, Kadispenad mengimbau masyarakat agar tidak terhasut oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di media sosial. Pihak TNI AD menegaskan bahwa sebuah tim khusus telah diterjunkan ke lokasi untuk menyisir sisa-sisa material pascaledakan dan mencari tahu pematik utama dari tragedi tersebut.

"Kami meminta publik untuk memberikan ruang bagi tim investigasi khusus bekerja. TNI AD berkomitmen untuk melakukan investigasi secara profesional, objektif, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mengungkap penyebab pasti dari insiden ini," tegas Donny.

Rekam Jejak Kelam

Tragedi di Madiun bukanlah kecelakaan tunggal yang berdiri sendiri tanpa preseden. Jika ditarik mundur, sejarah pertahanan Indonesia mencatat kronik panjang mengenai rapuhnya sistem pergudangan dan penanganan amunisi dari masa ke masa.

Sebelum insiden di pangkalan Puspalad Jawa Timur ini terjadi, memori kolektif publik baru saja dihentak oleh petaka kemanusiaan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 12 Mei 2025.

Dalam peristiwa memilukan tersebut, sebuah ledakan tak terduga muncul dari lubang disposal saat tim

militer tengah menyusun detonator untuk proses pemusnahan amunisi kedaluwarsa (afkir). Petaka kian berlipat ketika warga sipil mendekat untuk mencari sisa selongsong kuningan, hingga mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, termasuk empat prajurit TNI AD dan sembilan warga sipil.

Kerentanan moda mobilitas persenjataan juga sempat mengemuka pada Mei 2024, ketika sebuah truk pengangkut amunisi milik Satuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) tiba-tiba meledak dan terbakar hebat di tengah perjalanan operasionalnya di Jalur Tol KM 774.

Hanya berselang dua bulan sebelumnya, tepatnya pada 30 Maret 2024, insiden kolosal mengguncang Gudang Munisi Daerah (Gudmura) Kodam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor. Diduga akibat gesekan zat kimia pada amunisi sisa latihan yang telah usang, kompleks penyimpanan tersebut lumat terbakar bersama 150 ribu peluru, yang sempat melontarkan proyektil dan granat aktif langsung ke pekarangan rumah-rumah warga di sekitar perbatasan instalasi.

Pola kelalaian sistemis ini pun bukan sekadar fenomena kontemporer. Satu dekade lalu, pada 5 Maret 2014, korsleting arus listrik menyulut bahan peledak berbasis TNT di gudang amunisi Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ledakan beruntun itu meruntuhkan bangunan pangkalan, menewaskan satu personel, dan melukai 86 orang akibat hantaman serpihan material.

Namun, episentrum dari segala memori kelam pergudangan militer bermuara pada 29 Oktober 1984, di mana salah satu ledakan amunisi terdahsyat dalam sejarah modern Indonesia melumat gudang senjata Korps Marinir KKO di Cilandak, Jakarta Selatan.

Kelalaian kontrol suhu memicu reaksi berantai materiil peledak yang menerbangkan ratusan mortir serta roket liar ke pemukiman warga sipil

JEJAK KELAM LEDAKAN AMUNISI DI INDONESIA

Lanjutan dari Hal 11....

Gudang Kopaska Tanjung Priok

- Waktu: 5 Maret 2014
- Lokasi: Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Penyebab: Korsleting listrik menyambar bahan peledak berbasis TNT.
- Dampak: 1 orang meninggal dunia, 86 orang luka-luka akibat serpihan bangunan.

Gudang Korps Marinir Cilandak

- Waktu: 29 Oktober 1984
- Lokasi: Cilandak, Jakarta Selatan
- Penyebab: Kelalaian kontrol suhu/reaksi material di kompleks penyimpanan.
- Dampak: 15 orang tewas, ratusan luka-luka, ribuan rumah rusak. Roket & mortir meluncur liar hingga radius beberapa kilometer.

hingga radius beberapa kilometer, termasuk kawasan Cawang dan Mampang. Tragedi besar tersebut meninggalkan catatan kelam berupa 15 korban tewas, ratusan korban luka, serta ribuan rumah warga yang hancur lebur.

Tragedi ledakan di Madiun ini dengan cepat melintasi batas negara dan memicu perhatian dari meja redaksi internasional. Rangkuman pemberitaan media asing memperlihatkan bahwa komunitas internasional melihat insiden ini bukan sekadar kecelakaan kerja lokal, melainkan sebuah indikator penting terkait tantangan keselamatan kerja taktis (tactical safety) pada fasilitas militer di kawasan Asia Tenggara.

Kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, berfokus pada pembaruan berkala mengenai aspek keamanan regional dan fatalitas pada objek vital militer di Jawa Timur. Laporan Xinhua menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap perimeter instalasi militer guna memastikan efek ledakan tidak meluas menjadi ancaman stabilitas keamanan wilayah publik. (wid,xin,rls,kum/dya)



DPRD Surabaya Dukung Penataan Pedagang Kaki Lima

Laila Mufidah: Harus Humanis, Jangan Muncul Titik PKL Baru

PENATAAN pedagang kaki lima (PKL) kembali menjadi perhatian di Kota Surabaya. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengintensifkan penertiban PKL dan pedagang pasar tumpah di sejumlah titik yang dinilai mengganggu fungsi trotoar, badan jalan, hingga ruang publik.

Di sisi lain, kebijakan tersebut dibarengi dengan penyediaan lokasi relokasi berupa ribuan stan pasar dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya. Kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antara ketertiban kota dan perlindungan ekonomi masyarakat itu mendapat dukungan dari DPRD Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah menilai penataan PKL merupakan langkah yang diperlukan bagi kota metropolitan seperti Surabaya. Namun, menurutnya, penegakan aturan tidak boleh semata-mata berorientasi pada penertiban. Pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan humanis dengan menghadirkan solusi bagi para pedagang yang terdampak.

"Penataan harus dilakukan secara tertib, tetapi jangan sampai menghilangkan kesempatan masyarakat mencari nafkah. Yang paling penting adalah ada solusi yang jelas sehingga pedagang tetap bisa berusaha," kata Laila Mufidah, Kamis (16/7/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Ning Mufidah itu mengatakan keberadaan PKL merupakan bagian dari denyut ekonomi masyarakat perkotaan. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus pusat perdagangan dan jasa, Surabaya akan terus menjadi tujuan masyarakat untuk bekerja maupun membuka usaha. Kondisi tersebut membuat keberadaan sektor informal, termasuk PKL, sulit dipisahkan dari dinamika pertumbuhan kota.

Menurut dia, penataan PKL harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi rakyat dengan hak masyarakat atas ruang publik yang tertib dan aman. Trotoar, bahu jalan, maupun fasilitas umum pada dasarnya dibangun untuk kepentingan bersama sehingga tidak boleh beralih fungsi menjadi lokasi berdagang secara permanen.

"Mari tertib bersama tanpa mengambil hak atas fasilitas umum maupun berjualan di bahu jalan.



Pemerintah Surabaya menyiapkan sekitar 570 stan di Sentra Wisata Kuliner (SWK). (dok.pri)

Kondisi itu bisa mengganggu masyarakat karena memicu kemacetan," ujarnya.

Laila menegaskan, DPRD mendukung langkah Pemkot Surabaya yang terus memperbaiki tata kota. Penataan ruang publik, menurutnya, tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga meningkatkan kenyamanan warga, memperkuat wajah kota, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan dialog. Proses penataan harus melalui sosialisasi, pemberian peringatan, hingga penyediaan lokasi alternatif. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan penertiban yang hanya berorientasi pada tindakan represif.

Menurut Laila, selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan komitmen tersebut. Selain melakukan penertiban, pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif tempat usaha, baik melalui pasar rakyat maupun Sentra Wisata Kuliner yang tersebar di sejumlah wilayah kota.

Langkah itu, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghambat masyarakat mencari penghasilan. Sebaliknya, pemerintah berusaha memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi ruang publik.

"Mereka adalah warga Surabaya yang harus kita dukung untuk beraktivitas ekonomi. Tetapi jangan sampai melanggar hak masyarakat lain dengan berjualan di tempat yang bukan peruntukannya. Tapi ojo nglanggar yo, dodolan nang embong," kata Mufidah.

Apresiasi Fasilitas Stan

Ia juga mengapresiasi kebijakan Pemkot Surabaya yang menyediakan sekitar 2.700 stan kosong di pasar milik PT Pasar Surya Perseroda untuk menampung pedagang pasar tumpah maupun PKL yang terdampak penataan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 570 stan di Sentra Wisata Kuliner (SWK). Seluruh fasilitas tersebut disediakan sebagai bagian dari kebijakan relokasi yang mengedepankan solusi, bahkan tanpa dikenai biaya sewa pada saat penempatan.

Laila menilai pola tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan kepada pelaku usaha mikro. Baginya, keberhasilan penataan bukan hanya diukur dari bersihnya trotoar atau berkurangnya PKL di badan jalan, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah dalam pengelolaan SWK. Tidak semua sentra kuliner berkembang dengan tingkat kunjungan yang sama. Karena itu, selain menyediakan tempat, pemerintah juga perlu terus memperkuat promosi, memperbaiki fasilitas, serta menciptakan pusat-pusat kuliner yang benar-benar menjadi tujuan masyarakat.

Di sisi lain, Laila mengingatkan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti setelah penertiban dilakukan. Ia meminta Satpol PP bersama camat dan lurah melakukan pemantauan secara rutin agar kawasan yang telah ditata tidak kembali dipenuhi pedagang baru.

Menurutnya, terdapat sejumlah titik di Surabaya yang selama ini telah berhasil ditata

dan aktivitas berdagangnya dapat diatur dengan baik. Kondisi tersebut jangan sampai berubah karena muncul PKL baru yang memanfaatkan ruang publik tanpa izin."Termasuk aktivitas PKL yang ada di semua sudut dan wilayah Kota Surabaya. Namun yang perlu ditekankan adalah jangan ada PKL baru di salah satu titik. Satpol PP harus memantau intensif," kata Mufidah.

Laila berharap seluruh pihak dapat mendukung kebijakan penataan tersebut. Pemerintah, DPRD, aparat wilayah, hingga para pedagang perlu memiliki komitmen yang sama untuk membangun Surabaya sebagai kota yang tertib tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi rakyat.

"Kalau semua disiplin dan saling mendukung, saya optimistis penataan kota bisa berjalan beriringan dengan tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Itu yang menjadi tujuan bersama," katanya.(adv,ama/dya)



Mereka adalah warga Surabaya yang harus kita dukung untuk beraktivitas ekonomi. Tetapi jangan sampai melanggar hak masyarakat lain dengan berjualan di tempat yang bukan peruntukannya. Tapi ojo nglanggar yo, dodolan nang embong."

LAILA MUFIDAH

Wakil Ketua DPRD Surabaya

